

MASUK BURSA CAGUB JAKARTA

**Menteri Basuki: DNA Saya Nggak di Situ**

**JAKARTA (IM)** - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, dikabarkan masuk dalam bursa calon Gubernur DKI Jakarta. Menanggapi kabar tersebut, Basuki mengaku enggan maju karena merasa jabatan tersebut tidak sesuai dengan dirinya.

"Saya terima kasih, dan saya sudah bilang nggak. Nggak. DNA saya gada di situ," kata Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).

Basuki mengatakan, bahwa pada hakikatnya dirinya adalah seorang birokrat. Di sisi lain, ia menjelaskan bahwa dirinya sudah berumur. Usianya saat ini sudah menginjak 70 tahun. Berbagai hal ini menjadi alasan dirinya enggan diusung sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta.

"Saya ini birokrat ya. Dan saya sudah 70 tahun bos. jadi DNA-nya memang udah di situ, saya birokrat, saya sudah 70 tahun, mas mau (jadi gubernur)," tegasnya.

Namun ketika dikonfirmasi, Basuki menjelaskan tidak berkomunikasi dengan berbagai pihak maupun PDI Perjuangan sebagai partai pertama yang menyebut dirinya masuk dalam daftar tokoh-tokoh potensial menjadi calon Gubernur DKI Jakarta.

"Nggak, nggak ada. Tapi saya kalau ditanya saya bilang nggak. Gada mas," ungkapnya.

Di sisi lain, Basuki sendiri mengaku sudah menjelaskan mengenai sikap yang diambilnya kepada Presiden

Joko Widodo saat melakukan berbagai kunjungan kerja di daerah.

"Saya sudah bilang (sama) pak presiden waktu ngobrol-ngobrol di lapangan itu. 'Nggak pak saya,'" imbuhnya.

Sebelumnya berdasarkan catatan, PDIP mulai mengungkap sejumlah nama potensial diusung sebagai Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta. Ada sosok Menteri Sosial, Tri Rismaharini, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas hingga Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.

"Ini kita masih dalam proses penjarangan, tetapi dalam konteks sumber daya ya PDI-Perjuangan cukup banyak. Bisa saja seperti Risma, Ketua DPRD (Prasetyo), bisa aja, kita banyak potensi. Termasuk juga misalnya Azwar Anas," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Jakarta, Pantas Nainggolan saat ditemui di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/4) lalu.

Sementara tokoh-tokoh lain yang masuk dalam bursa Cagub DKI antara lain Eks Panglima TNI sekaligus Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud Andika Perkasa, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, dalam mengambil keputusan, partainya mempertimbangkan sejumlah faktor.

"Pak Basuki juga, termasuk juga Pak Andika Perkasa. (Ahok) ya dia kader kader kita juga, tapi kan dalam mengambil keputusan pasti kita mempertimbangkan banyak hal," jelasnya. ● **yan**

**Pemkot Depok Bakal Bangun Turap untuk Atasi Banjir Berbulan-bulan**

**DEPOK (IM)** - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan membangun turap untuk mengatasi banjir di Bulak Barat-Pasir Putih, Cipayung, Kota Depok, Jumat (3/5).

"Langkah permanennya, kami akan berkomunikasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BWSCC) untuk mengurap (membangun turap) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri, Jumat (3/5).

Turap tersebut bisa mencegah terjadinya kembali longsor sampah yang menyumbat saluran air dan menumpuk di sekitar jembatan penghubung Bulak Barat dan Pasir Putih. "Yang kedua, kami akan mencoba mengubah lahan yang terdendam itu menjadi semacam penampungan air," tutur Supian.

Karena letak geografisnya yang sangat rendah, area yang terdampak banjir selama empat bulan itu harus dikosongkan. Area tersebut dianggap tak layak lagi dijadikan lahan permukiman. "Konsekuensinya ya kami harus lakukan pembebasan lahan terhadap rumah-rumah warga yang saat ini terendam," jelas Supian.

Penanggulangan banjir tersebut diperkirakan baru selesai sekitar satu hingga dua tahun. "Untuk penanganan jangka panjang akan memang membutuhkan

waktu yang panjang. Karena ya tadi, kondisi di lapangan tidak mudah, lumayan membutuhkan dana yang besar dan waktu yang cukup panjang," ujar Supian. "Kami akan selalu berkoordinasi terutama dengan BWSCC, yang jadi tanggung jawabnya," lanjut dia.

Sebagai informasi, sudah empat bulan permukiman RT 04 RW 08 Kelurahan Cipayung, Depok, Jawa Barat, terendam banjir akibat luapan Kali Pesanggrahan. Setidaknya ada dua rumah dan satu pabrik yang terendam air dan tak kunjung surut hingga saat ini. Ketua RT 04 Naserih (46) menduga, banjir dikarenakan tumpukan sampah yang tidak pernah dibersihkan.

"Intinya bukan yang lain-lain tapi enggak ada pengerjaan di ujung jalan sana terkait sampah itu. Seandainya sampah ada dalam artian diperluas jalur airnya," ungkap Naserih, beberapa waktu lalu.

Sampah dari TPA Cipayung kian menumpuk terutama di area dekat jembatan akses penghubung Cipayung dan Sawangan. "Jadi sampah itu istilah sunda-nya turun 'ngagalosor', karena kalau sampah kan enggak punya pegangan ke bawahnya, kebanyakan plastik kan. Kalau tanah mungkin bisa memadat ke bawah, kalau sampah ya ikutin arus terus," jelas Naserih. ● **yan**

# 4 | Metropolis

FOTO: ANT

**PENYALURAN BANTUAN PANGAN TAHAP KEDUA**

Petugas Satpol PP memberikan beras ke-masan 10 kg kepada warga saat pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap kedua di Kantor Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5). Pemerintah melalui Perum Bulog mulai melakukan penyaluran bantuan pangan beras tahap dua di wilayah Jakarta sebanyak 8.070 ton beras kepada Keluarga Penerima Manfaat.

BERHARAP DIREALISASIKAN GUBERNUR DKI

## Ahok Beberkan Solusi Penanganan Macet Jakarta

Kalau bisa diterapkan, ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya menjadi gubernur DKI Jakarta, kata Ahok.

**JAKARTA (IM)** - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membicarakan beberapa solusi mengatasi masalah kemacetan di Ibu Kota yang programnya belum terealisasi ketika menjabat. Pria yang akrab disapa

Ahok ini berharap, program penanganan macet di Jakarta bisa diwujudkan oleh Gubernur DKI.

"Kalau bisa diterapkan, ini sangat baik. Ini sebetulnya program saya yang belum sempat dilaksanakan waktu saya

menjadi gubernur DKI Jakarta," kata Ahok dalam video di channel YouTube pribadinya, dikutip Jumat (3/5).

Menurut Ahok, membangun kawasan superblok adalah salah satu solusi penanganan kemacetan di Jakarta yang belum terealisasi. Pembangunan superblok dinilai bisa memberikan fasilitas kepada warga agar kesediaannya juga beraktivitas di Jakarta. "Banyak sekali pasangan muda, punya anak masih kecil, tetapi mereka menghabiskan waktu

empat sampai lima jam (perjalanan) untuk kerja. buang energi, tapi mau beli rumah di Jakarta mahal," kata Ahok.

"Karena itu, pemerintah yang menyediakan apartemen sewa bulanan yang murah," imbuh Ahok.

Ketika menjadi orang nomor satu di Jakarta, Ahok telah merencanakan hunian untuk masyarakat berkonsep superblok. Konsepnya memiliki fasilitas serupa dengan apartemen tetapi biaya sewa yang dikeluarkan warga seperti membayar kos-kosan. "Dengan begitu, warga bisa (menggunakan biaya untuk) menyicil mobil, beli BBM, bayar tol, lalu tabungan," kata Ahok.

Penanganan macet di Jakarta yang juga bisa dilakukan Perprov DKI adalah menyediakan lahan untuk parkir kendaraan di tengah jantung ibu kota. Sehingga pengendara yang hanya bermobilitas di Jalan MH-Thamrin dan Sudirman dapat memarkirkan mobil atau motornya, lalu beralih untuk menggunakan transportasi publik.

"Dulu konsep saya itu membangun (lahan parkir) di bawah Monas yang luasnya hampir 70 hektar, kalau tidak salah. Itu dibangun parkir di bawah tanah, sehingga kendaraan yang mau masuk di Jalan Sudirman Thamrin yang macet itu bisa parkir di sana," ucap Ahok. ● **yan**

## Jasa Marga Tutup Sementara Off Ramp Grogol

**JAKARTA (IM)** - Jasa-marga Metropolitan Tollroad sebagai pengelola Jalan Tol Dalam Kota akan tutup off ramp Grogol untuk melakukan perbaikan jalan tol pada Sabtu malam.

Marketing and Communication Department Head Jasa-marga Metropolitan Tollroad, Panji Satriya mengatakan, bersama PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) selaku service provider pemeliharaan jalan tol, mereka akan melakukan pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Off Ramp Grogol/Jalan S. Parman atau Daan Mogot.

Panji mengimbau pengguna jalan agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota area off ramp Grogol. Pekerjaan

rekonstruksi itu, kata Panji, sebagai wujud dan komitmen meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, serta dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

"Jasa Marga dan PT JMTM memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat pekerjaan tersebut," kata Panji melalui siaran tertulis diterima, Jumat (3/5). Pekerjaan rekonstruksi perkerasan di area Off Ramp Grogol KM 13+800 Ruas Tol Dalam Kota ini akan dilaksanakan pada Sabtu malam, 4 Mei 2024, pukul 21.00 sampai Minggu pagi, pukul 05.00 WIB.

Selama perbaikan jalan tersebut berlangsung, akan dilakukan penutupan jalan sementara secara situasional

sesuai diskresi Kepolisian.

Akibat penutupan sementara tersebut, pengguna jalan tol dalam kota yang akan menuju Tanjung Duren/Grogol atau Jalan S. Parman/Daan Mogot dapat menggunakan Off Ramp Tomang di KM 11+900.

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk mengantisipasi rute perjalanan agar dapat mengoptimalkan rekayasa lalu lintas yang sedang berlaku dan memastikan kecukupan saldo kartu elektronik sebelum memulai perjalanan untuk menghindari kepadatan ketika bertransaksi di gerbang tol.

Diharapkan pengguna jalan untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas dan mengikuti arahan petugas di lapangan. ● **yan**

**PENGASAPAN ANTISIPASI WABAH DBD DI JAKARTA TIMUR**

Seorang petugas melakukan pengasapan (fogging) di perumahan Ikip, Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (3/4). Pengasapan tersebut untuk memberantas nyamuk aedes aegypti dalam upaya mencegah wabah DBD.

## Dishub Gandeng Satpol PP Tertibkan Juru Parkir Liar di Minimarket

**JAKARTA (IM)** - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna menangani maraknya juru parkir yang melakukan pungutan liar (pungli) di minimarket.

"Kami akan berkoordinasi dengan teman-teman Satpol PP DKI untuk penanganan terkait orang-orang yang memanfaatkan lokasi-lokasi di minimarket dengan cara memaksa memungut jumlah tertentu," kata Kadishub, Syafrin Liputo saat dikonfirmasi, Jumat (3/5).

Ia menegaskan, sesuai regulasi, parkir di minimarket tidak dipungut biaya sepersepuluh alias gratis. Bahkan, pihak pengelola bangunan juga tidak diperbolehkan memungut biaya parkir.

"Sayangnya memang ada pihak yang mencoba memanfaatkan karena memang gratis. Mereka mencoba mengatur itu sehingga seolah-olah menjadi kewajiban si pengunjung untuk membayar, seharusnya kan tidak. Itu kan memang fasilitas yang harus disiapkan di minimarket," jelas Syafrin.

Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap kelengkapan fasilitas pendukung parkir di lokasi-lokasi minimarket di Jakarta.

Sebelumnya, ramai di media sosial terkait keluhan masyarakat dengan adanya juru parkir liar di minimarket.

"Jukir liar di minimarket memang membuat tidak nyaman pengunjung, karena sebenarnya parkir di tempat tersebut gratis. Kondisi itu terjadi karena pemerintah setempat tidak tegas men-

egakkan aturan dan tidak mampu memberi lapangan pekerjaan yang layak untuk angkatan kerja yang ada," tulis akun @hanssolo.

Sejumlah netizen lainnya juga mengeluhkan keberadaan juru parkir liar di minimarket. Salah satu lainnya diunggah akan media sosial TikTok 'Calon Wali Kota' yang mengunggah keberadaan juru parkir liar di minimarket dan UMKM yang membuat konsumen enggan datang ke lokasi untuk berbelanja.

Pro kontra terjadi di

kolom komentar video unggahan di media sosial. Ada yang menyebutkan bahwa membayar parkir atau pungutan liar parkir di minimarket sebesar Rp2 ribu tidak akan membuat seseorang miskin. Namun, ada pula warganet yang kontra karena penghasilan yang didapatkan juru parkir liar cukup besar, bahkan bisa melebihi UMP DKI apabila di lokasi-lokasi ramai dan strategis hingga keberadaan jukir yang hanya muncul usai pemilik motor keluar minimarket lalu meniup peluit. ● **yan**

## DPRD DKI terus Dorong Pemprov Implementasikan Sekolah Gratis

**JAKARTA (IM)** - Usulan Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait sekolah gratis direpson positif Pemprov DKI Jakarta. Anggota Komisi E, Basri Baco, mengatakan usulan tersebut menjadi rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta dalam forum Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (2/5).

"Berdasarkan hasil rekomendasi Komisi E bidang Kesejahteraan, sudah diputuskan segera diwujudkan sekolah gratis untuk warga Jakarta dari TK sampai SMA," ujar Baco usai rapat Banggar di DPRD DKI Jakarta, pada Kamis (2/5) kemarin.

Menurutnya, langkah ini merupakan lompatan yang luar biasa bagi rakyat Jakarta. Jika rencana ini dieksekusi hal itu menjadi warisan atau legacy Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kepada warganya.

"Kalau jadi, ini bisa menjadi kado indah dari Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono bahwa di zaman beliaulah dicanangkan dan dicetuskan bersama bahwa kami akan solid kompak dan akan semangat mewujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis untuk rakyat Jakarta," kata Baco.

Ia menjelaskan, usulan Komisi E tersebut juga tengah dikaji Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan.

Dia meyakini, Pemprov DKI mampu mengeksekusi program sekolah gratis, karena alokasi anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) yang dimiliki mencapai Rp80 triliun lebih setiap tahun.

"Dalam rapat Komisi E juga sudah disampaikan Dinas Pendidikan, mereka sudah mendapatkan arahan pimpinan eksekutif pak Pj Gubernur dan Sekda, bahwa sudah dikaji dan mempertimbangkan segala aspek yang dipikirkan dan kerjakan terkait dengan diwujudkan sekolah gratis," ucap dia.

Dalam diskusi tersebut,

kata dia, Dinas Pendidikan menyampaikan dana yang diperlukan tidak terlalu besar dibanding daerah lain.

Jika dibandingkan dengan pemerintah daerah Bali, alokasi anggaran yang mereka siapkan sekitar Rp4 triliun untuk sekolah gratis.

"Dana yang kita perlukan tidak sampai Rp 1 triliun, ini lebih jauh rendah dugaan kami dari Komisi E, karena enam bulan lalu kami ada Bimtek (Bimbingan Teknis) di Bali dan mengundang Disdik untuk berdiskusi dengan Pemda Bali, sempat terancam kami butuh Rp 4 triliun, tetapi hasil kajian sementara turun menjadi Rp 1 triliun," tuturnya.

"Ini artinya akan lebih mudah untuk kami wujudkan apa yang kita sebut dengan sekolah gratis. Untuk teknis ya nanti di Dinas Pendidikan yang bisa menjelaskannya," sambung Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta ini.

Kendati sekolah gratis, Baco memastikan program sekolah gratis hanya menasar satuan pendidikan swasta yang memiliki grade atau penilaian C ataupun D.

Sementara bagi sekolah swasta dengan grade A dan B, tidak digratiskan karena mayoritas yang mengenyam pendidikan di sana adalah pelajar dari keluarga menengah ke atas atau mampu.

"Sekolah gratis yang dimaksud adalah sekolah gratis untuk sekolah swasta dengan grade C dan D, bukan sekolah gratis yang mewah atau high class bagi warga yang punya kemampuan sekolah berbayar swasta. Kedua gratis untuk sekolah negeri, dan tentunya berlaku dengan aturan yang ada, zonasi dan lainnya," ungkap dia.

Baco menambahkan, sekolah gratis untuk masyarakat tidak mampu di satuan pendidikan swasta menjadi amat penting untuk diterapkan. Pasalnya banyak pelajar kurang mampu akhirnya menenggak iuran bulanan, sehingga ketika lulus ijazahnya ditahan sekolah. ● **yan**